



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 41 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA AHLI STAF AHLI HUKUM POLITIK DAN PEMERINTAHAN,  
STAF AHLI INVESTASI DAN KERJA SAMA, DAN STAF AHLI EKONOMI DAN  
PEMBANGUNAN TAHUN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin, yaitu Banjarmasin Baiman dan Lebih Bermartabat, melalui program prioritas revitalisasi sungai untuk mendukung pariwisata berbasis sungai dan transportasi sungai, mengembangkan dan meningkatkan kualitas Wira Usaha Baru yang mandiri untuk mengembalikan Banjarmasin sebagai Kota Perdagangan dan Jasa, dan Pelayanan publik berbasis *SMART CITY*, perlu dibantu Tenaga Ahli Staf Ahli Hukum Politik dan Pemerintahan, Staf Ahli Investasi dan Kerja sama, dan Staf Ahli Ekonomi dan Pembangunan Tahun 2024;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penunjukan Tenaga Ahli Staf Ahli Hukum Politik dan Pemerintahan, Staf Ahli Investasi dan Kerja sama, dan Staf Ahli Ekonomi dan Pembangunan Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 67);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Perujukan Tenaga Ahli Staf Ahli Hukum Politik dan Pemerintahan, Staf Ahli Investasi dan Kerja sama, dan Staf Ahli Ekonomi dan Pembangunan Tahun 2024 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tugas Tenaga Ahli Staf Ahli sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
- a. menghimpun data dan informasi kebijakan pemerintah kota terkait pengelolaan Pariwisata, Penataan Bantaran Sungai, dan *Smart City*, dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
  - b. melaksanakan pemantauan pelaksanaan kebijakan pemerintah kota terkait pengelolaan Pariwisata, Penataan Bantaran Sungai, dan *Smart City*, dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
  - c. melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisis permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah kota terkait pengelolaan Pariwisata, Penataan Bantaran Sungai, dan *Smart City*, dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
  - d. melaksanakan kajian analisis permasalahan pelaksanaan kebijakan pemerintah kota terkait pengelolaan Pariwisata, Penataan Bantaran Sungai, dan *Smart City*, dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
  - e. membuat telaahan dan alternatif pemecahan masalah pelaksanaan kebijakan pemerintah kota terkait pengelolaan Pariwisata, Penataan Bantaran Sungai, dan *Smart City*, dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
  - f. pengembangan gagasan baru, membantu Wali Kota menegakkan *good governance*, menerjemahkan ide-ide strategis Wali Kota ke dalam aksi yang konkret dan Baiman serta Bermartabat, mitra diskusi pimpinan, dan SKPD lingkup Pemerintah Kota Banjarmasin;
  - g. dan tugas-tugas lainnya yang diberikan Wali Kota secara khusus; dan
  - h. Melaporkan secara berkala dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Wali Kota.

- KETIGA : Tenaga Ahli Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban membuat Kegiatan dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugasnya beserta dokumentasi kegiatan kepada Wali Kota melalui Staf Ahli secara berkala.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah cq. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 2 Januari 2024  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 41 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENUNJUKAN TENAGA AHLI STAF AHLI  
 HUKUM POLITIK DAN PEMERINTAHAN,  
 STAF AHLI INVESTASI DAN  
 KERJASAMA, DAN STAF AHLI  
 EKONOMI DAN PEMBANGUNAN TAHUN  
 2024

DAFTAR TENAGA AHLI STAF AHLI HUKUM POLITIK DAN PEMERINTAHAN, STAF  
 AHLI INVESTASI DAN KERJASAMA, DAN STAF AHLI EKONOMI DAN  
 PEMBANGUNAN TAHUN 2024

NO	JABATAN STAF AHLI	MENGAMPU BIDANG	NAMA TENAGA AHLI	JASA/HONOR / BULAN ( Rp )
1.	Staf Ahli Hukum Politik Dan Pemerintahan	Bidang Sosial	1. Fajery	4.000.000,-
		Bidang Agama	2. Ahmad Saufi Abie	4.000.000,-
		Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3. Anisa Cahayani	4.000.000,-
2.	Staf Ahli Investasi Dan Kerja sama	Bidang Perencanaan, Infrastruktur, Kewilayahan dan Perkotaan	1. Ir. H. Sugito, MSP	4.000.000,-
		Bidang Pariwisata dan ekonomi Kreatif	2. Abdul Khair	4.000.000,-
		Bidang Kesehatan dan Lingkungan	3. Dendy Primanandi, S.T, M.T	4.000.000,-
3.	Staf Ahli Ekonomi dan Pembangunan	Bidang Komunikasi Masyarakat	1. Drs. Fathurrahman	4.000.000,-
		Bidang Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	2. Irfan	4.000.000,-
		Bidang Pemuda dan Olahraga	3. Andri Sanitra	4.000.000,-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA